



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah pusat politik RI dipindahkan ke Yogyakarta pada awal tahun 1946, dua jenis sistem pers muncul di Nusantara (Lee, 1971:35). Pertama, terdiri dari surat kabar-surat kabar yang muncul di bawah wilayah kontrol Belanda. Kedua, berfungsi di daerah-daerah yang diduduki oleh RI. Untuk memperluas area agar berada di bawah kontrol republik, masyarakat Indonesia, hingga akhir Oktober 1945 setelah kedatangan pasukan Sekutu pertama, berperang melawan Jepang untuk menguasai kota-kota penting seperti Bandung, Yogyakarta, Semarang dan Surabaya.

Di kota-kota seperti Jakarta, beberapa surat kabar Indonesia mengisi kekosongan yang diciptakan oleh runtuhnya pers yang dikendalikan oleh Jepang. Harian Republik Indonesia pertama *Berita Indonesia* diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 September 1945 dan segera diikuti oleh *Merdeka*. Tak lama kemudian keduanya bergabung dengan pemerintah Republik di kubu Jawa Tengah. Hal ini terkait dengan suasana kebebasan politik yang baru diperoleh, sistem pers muncul sebagai refleksi yang tepat dari eksistensi sistem multi partai.

Dalam periode itu (Lee, 1971:36-37), partai-partai politik pun muncul seperti Masyumi, yang didirikan pada 7 November 1945, berada di bawah nama yang

sama dengan asosiasi yang mengutamakan agama dan sosial dalam massa kependudukannya, PNI dan PKI yang telah ada selama periode kolonial Belanda, dan pihak lainnya yang lebih kecil seperti Partai Sosialis Indonesia (PSI), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), dan Partai Katolik Indonesia.

Dan, sebagai partai politik yang menghargai diri sendiri dibutuhkan organisasi pers sendiri, baik untuk mengumumkan kebijakan dan untuk bersaing dengan pihak lain dalam memperoleh simpati dan dukungan dari pemilih, sejumlah surat kabar segera muncul di seluruh wilayah Indonesia, meskipun mereka tidak selalu unggul dalam kualitas atau daya tahan (Lee, 1971:37).

Dalam perkembangan selanjutnya (Lee, 1971:50), *Harian Rakjat* yang merupakan surat kabar harian milik PKI menjadi surat kabar terbesar sirkulasinya pada Januari 1956 dengan jumlah oplah sebesar 55.000. *Pedoman*, surat kabar harian milik PSI berada di posisi kedua dengan jumlah oplah 48.000. *Suluh Indonesia*, surat kabar harian milik Partai Nasionalis Indonesia (PNI) di posisi ketiga dengan oplah 40.000. *Abadi*, surat kabar harian milik Masyumi, di posisi keempat dengan oplah sebesar 34.000.

Adanya pers-pers yang dibentuk dan berafiliasi dengan partai menjadi sebuah ciri pers pada periode ini, salah satunya *Harian Rakjat*. Hadirnya *Harian Rakjat* sebagai salah satu harian terbesar di Indonesia pada waktu itu menjadi alasan penulis untuk mengambil penelitian mengenai surat kabar milik PKI ini, yang tentunya masih sangat menarik untuk dibahas dalam periode dewasa ini.

Munculnya *Harian Rakjat* sebagai surat kabar harian terbesar di Indonesia, tak terlepas dari munculnya Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai sebuah kekuatan besar di Indonesia setelah berhasil menduduki peringkat keempat dalam pemilihan umum 1955, dengan PNI, Masyumi, dan NU berada di peringkat teratas (Samsudin, 2004:xv).

PKI memperoleh 6.176.914 suara (16,4%) dengan jumlah kursi di parlemen sebanyak 39 buah (15,2%). Di bawah kepemimpinan D.N. Aidit (1951-1965), PKI berhasil masuk dalam tubuh pemerintahan, dengan konsepsi politik “Nasakom” yang diusung Presiden Sukarno.

Pers-pers komunis dan simpatisan-simpatisannya pun bermunculan dengan pesat di Indonesia. Bahkan, pers komunis dan simpatisan-simpatisannya pada tahun 1962-1965 menduduki posisi yang dominan dalam menciptakan opini publik dan politik serta memengaruhi kebijakan pemerintah (Abar, 1995:51). Surat kabar-surat kabar yang termasuk dalam kelompok pers komunis dan simpatisannya, antara lain adalah *Harian Rakjat*, *Bintang Timur*, *Warta Bakti*, *Suluh Indonesia*, *Gelora Indonesia*, *Ekonomi Nasional*, *Huo Chi Pao*, dan *Bintang Minggu* semuanya terbit di Jakarta, *Warta Bandung* di Bandung, *Gema Massa* di Semarang, *Jalan Rakyat* dan *Jawa Timur* di Surabaya, *Waspada* di Yogyakarta, *Suara Khatulistiwa* dan *Kalimantan Membangun* di Pontianak, *Harian Harapan* dan *Gotong Royong* di Medan, serta *Pikiran Rakyat* di Palembang.

Pers-pers komunis dan simpatisannya tersebut digunakan oleh PKI sebagai corong politik mereka. PKI menggunakan surat kabar milik mereka sebagai alat

propaganda partai, menyebarkan ajaran “Marxisme-Leninisme” yang menjadi ideologi kaum komunis.

Harian Rakjat (HR) sendiri adalah surat kabar resmi PKI. Pertama kali terbit pada 31 Januari 1951 dengan nama *Suara Rakyat*, *Harian Rakjat* memiliki jargon “Untuk rakjat hanya ada satu harian, *Harian Rakjat*.” Pendirinya adalah Siauw Giok Tjhan (1914-1981), wartawan majalah *Liberty* dan *Pemuda*. Ia anggota Konstituante, pendiri Baperki, organisasi massa warga keturunan Tionghoa yang kemudian dilarang pasca-G30S (TEMPO, 2010:43).

Di bawah tempaan Njoto, yang kemudian diangkat sebagai Ketua Departemen Agitasi dan Propaganda, *Harian Rakjat* menjadi terompet PKI, pendukung kebijakan partai. *Harian Rakjat* tak ubahnya pamphlet, tak ada edisi yang muncul tanpa kata “rakyat” dan dukungan kepada Manifesto Politik (Manipol) Sukarno (TEMPO, 2010:44). Jurnalisme yang diusung oleh *Harian Rakjat* pun adalah jurnalisme konfrontasi dengan bahasa yang meledak, tembak langsung, jambak, sikat, dan pukul di tempat (Aria dan Muhidin, 2008:77).

PKI sebagai sebuah organisasi komunis, menerapkan “Marxisme-Leninisme” yang merupakan ideologi resmi komunisme. Komunisme dalam abad ke-20 memang menjadi momok bagi umat manusia. Selama sebagian besar abad tersebut, komunisme menjadi salah satu kekuatan politik dan ideologis paling dahsyat di dunia (Suseno, 2003:1). Sebagai sebuah ideologi perjuangan, “Marxisme” menyemangati sebagian besar gerakan buruh sejak akhir abad ke-19 dan dalam abad ke-20. Indonesia, dengan adanya PKI, turut menjadi salah satu

negara yang terserang Manifesto Komunis, dokumen Marxisme paling termasyhur yang ditulis oleh Friedrich Engels dan Karl Marx pada akhir tahun 1847.

Pengaruh dua kekuatan besar komunisme pada waktu itu, yakni komunisme Rusia (Uni Soviet) yang dipelopori oleh V.I. Lenin dan China dengan tokohnya Mao Zedong menjadi dua kekuatan besar yang sangat berpengaruh terhadap negara penganut komunisme lainnya termasuk Indonesia. Rusia sebagai negara komunis pertama di dunia dan China sebagai blok komunis terbesar di Asia. China adalah negara yang menerapkan doktrin Marxisme-Leninisme dengan caranya sendiri, yang disesuaikan dengan kondisi negara tersebut.

Pemberitaan-pemberitaan *Harian Rakjat* yang bersifat konfrontasi dengan bahasa yang meledak, tegas, dan “pukul di tempat” menjadi hal yang sangat menarik untuk dilihat ideologinya, yang tentunya berkaitan dengan ideologi PKI sendiri sebagai pemilik *Harian Rakjat*.

Menarik bagi penulis untuk melihat bagaimana *Harian Rakjat* dalam memberitakan suatu peristiwa, praktik produksi teks di *Harian Rakjat*, pengaruh PKI terhadap kebijakan redaksional *Harian Rakjat*, serta bagaimana posisi atau kecenderungan ideologi PKI di antara pengaruh dua komunisme dunia, Rusia dan China sebagai dua kekuatan besar komunisme yang tentunya memberikan pengaruh terhadap teks-teks pemberitaan *Harian Rakjat*.

Pemberitaan *Harian Rakjat* mengenai aksi boikot film Amerika Serikat (AS) menjadi kasus yang diambil penulis dalam melihat praktik ideologi surat kabar

yang dikomandai oleh Njoto tersebut. Puncak dari aksi boikot film AS tersebut adalah penutupan AMPAI.

AMPAI (*America Movie Picture Association of Indonesia*) adalah asosiasi film bioskop Amerika, yang pada tahun 1964 menghadapi aksi pengganyangan oleh PKI. *Harian Rakjat* bukan saja pelaksana dari kerja penerangan, propaganda, dan pengorganisasian bidang politik, namun juga merupakan mesin generator di bidang kebudayaan, termasuk film. Hal ini relevan mengingat *Harian Rakjat* didirikan dan dijalankan oleh para budayawan dan juga politikus seperti Njoto (Aria dan Muhidin, 2008:95-96).

Aksi boikot film AS yang berujung pada penutupan AMPAI menjadi kasus yang dipilih oleh penulis karena pada periode-periode tahun 1960-an, ketidaksukaan atau sentimen bangsa Indonesia terhadap Amerika Serikat (AS) meningkat. Hal ini dipicu dengan adanya campur tangan bantuan AS dalam pemberontakan-pemberontakan daerah melawan pusat, yang kemudian terus berkelanjutan dengan persetujuan AS terkait terbentuknya Negara Federasi Malaysia (komunike bersama Johnson-Tengku), dan praktik-praktik imperialisme kebudayaan AS.

AMPAI yang pada waktu itu memang mendominasi perbioskopian Indonesia dengan film-filmnya yang tidak sesuai dengan semangat revolusi pada waktu itu, menjadi salah satu bagian dari Amerika yang dihajar oleh PKI. PKI yang pada dasarnya tidak menyukai negara-negara kapitalis dan imperialis – sebagai bagian

dari praktik komunisme – salah satunya AS, tak pelak mengharapakan AMPAI ditutup.

Sebelum tahun 1964, yang merupakan tahun-tahun penghancuran film-film produk Amerika dan antek-anteknya, pembahasan mengenai film di tubuh PKI (Partai Komunis Indonesia) ataupun Lekra (organisasi kebudayaan milik PKI) tidak semeriah sastra, misalnya. *Harian Rakjat* sebelum 1964 hanya memuat berita-berita kecil di bidang ini dan belum mendapatkan tempat di halaman depan. Namun, setelah “Manifes Kebudayaan” dilarang pada 8 Mei 1964 oleh Presiden Soekarno, aksi pengganyangan terhadap unsur-unsur anti-Nasakom dan kontra revolusi pun mulai beralih ke bidang perfilman (Moeljanto dan Taufiq, 1995:53). Perkembangan ini terjadi setelah terbentuk apa yang dinamakan Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat (PAPFIAS), yang disponsori oleh Front Nasional, meskipun kenyataannya didalangi Lekra/PKI (Moeljanto dan Taufiq, 1995:53).

Penutupan AMPAI merupakan puncak dari pergerakan aksi boikot film-film AS. Dan, pada 17 Agustus 1964, pemerintah Indonesia akhirnya melarang segala kegiatan yang dilakukan AMPAI. Namun, pihak PAPFIAS dalam pernyataannya tetap menuntut dihentikannya secara total peredaran dan pemutaran film-film Amerika Serikat di seluruh gedung bioskop.

Film menjadi salah satu bidang yang mendapat *critical point* bagi PKI. Bukan hanya karena film dapat diproduksi secara massif, namun juga dikarenakan pengaruh film yang luar biasa besarnya bagi perkembangan perilaku masyarakat

(Aria dan Muhidin, 2008:202). Dalam hal ini, lembaga kebudayaan milik PKI yakni Lekra menjadi alat PKI dalam mengkritik film asal Amerika. Film oleh Amerika dipakai sebagai alat untuk memeras dan menindas, serta mengembangkan rasialisme yang sejalan dengan seluruh kepentingan politik penguasaan negara-negara imperialis (Aria dan Muhidin, 2008:220).

Oleh sebab itu, dalam melihat pemberitaan-pemberitaan *Harian Rakjat* mengenai aksi-aksi boikot yang berujung pada penutupan AMPAI, penulis menggunakan sudut pandang wacana anti-AS. AS sebagai negara kapitalis imperialis ditentang oleh kaum komunis. PKI sebagai bagian dari praktik komunisme dunia juga tak pelak menentang AS, sehingga AMPAI beserta film-film Amerikanya yang merupakan bagian dari AS turut ditentang oleh PKI.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan tiga masalah yang merupakan isi dari skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana *Harian Rakjat* mewacanakan anti-AS melalui AMPAI dan film-film Amerikanya dalam peristiwa aksi boikot terhadap film AS yang berujung pada penutupan AMPAI?
2. Bagaimana praktik wacana (produksi teks) di dalam *Harian Rakjat*? Bagaimana pengaruh PKI dalam kebijakan redaksional *Harian Rakjat*?

mengenai peristiwa aksi boikot film AS yang berujung pada penutupan AMPAI?

3. Apa ideologi *Harian Rakjat* di balik pemberitaannya? Bagaimana posisi atau kecenderungan ideologi PKI di antara pengaruh komunisme Rusia dan China mempengaruhi praktik teks-teks berita *Harian Rakjat* mengenai peristiwa aksi boikot film AS yang berujung pada penutupan AMPAI?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada pemaparan latar belakang masalah dan identifikasi (rumusan) masalah yang sudah penulis jabarkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui deskripsi wacana anti-AS dalam pemberitaan *Harian Rakjat* mengenai peristiwa aksi boikot film AS yang berujung pada penutupan AMPAI.
2. Untuk mengetahui praktik wacana (produksi teks) di *Harian Rakjat* dan bagaimana pengaruh PKI dalam kebijakan redaksional *Harian Rakjat* mengenai peristiwa aksi boikot film AS yang berujung pada penutupan AMPAI.
3. Untuk mengetahui ideologi *Harian Rakjat* serta posisi atau kecenderungan ideologi PKI di antara pengaruh komunisme Rusia dan China yang

mempengaruhi praktik teks-teks berita *Harian Rakjat* mengenai peristiwa aksi boikot film AS yang berujung pada penutupan AMPAI.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap konsep-konsep ekonomi politik media yang tidak hanya terjadi pada era media sekarang, namun juga terjadi pada era media 1950-an.
2. Secara sosial, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemahaman kepada khalayak luas bahwa media bukanlah sarana yang netral dikarenakan kepentingan pemilik media yang terkait di dalamnya.

